

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja daerah (Y) adalah $0.057 > 0.5$ dan nilai t hitung $< t$ tabel ($1.936 < 1.998$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Sedangkan, nilai signifikan untuk pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja daerah (Y) adalah $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($7.776 > 1.998$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diketahui dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih merespon belanja daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

masih sangat bergantung pada alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja daerah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana utama untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan melakukan upaya ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan dengan penjaringan Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi yang baru. Penjaringan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk saling berbagi data pajak.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan melakukan upaya intensifikasi pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai dengan potensi daerah melalui pajak daerah. Salah satu cara untuk

mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan dilapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi dengan menambahkan variabel lain, seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus agar penelitian ini bisa berkembang dan/atau menggunakan total Dana Transfe (Dana Perimbangan).
- b. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas interval waktu penelitian dan cakupan wilayah penelitian antar satu provinsi dengan provinsi lainnya untuk melihat apakah fenomena *flypaper effect* ini juga terjadi di daerah lain atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Armadani Fifi dan Maryono. 2022. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5. No. 2. Februari 2022.
- Armawaddin, Muhammad. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 16. No.1. ISSN 2406-9280.
- Astutik, Puji. 2016. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D. I. Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2020. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kota Kupang: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2022. *Provinsi NTT dalam Angka*. Kota Kupang: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.
- Ekawarna. 2017. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 4. No. 3. Januari – Maret 2017.
- Fadilah Haris dan Helmayunita Nayang. 2020. Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2. No. 3. Agustus 2020.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Solikhul. 2018. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Optimum* Vol. 8. No. 2. September 2018.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.

- Linawati dan Sholikhah M. 2019. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kota Kediri. *Jurnal Cahaya Aktiva* Vol. 9. No. 2. September 2019.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9*.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Melo, L. 2002. *The Flypaper Effect Under Different Institutional Contexts: The Colombian Case*. *Public Choice* 111 (3-4): 317-345.
- Oktavia, Deni. 2014. *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* Vol. 12. No. 2. Desember 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metode Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Rizal Yani, Safuridar, dan Siregar Ayub Muhammad. 2021. Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi* Vol 5. No.2. ISSN 2615-1227.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Cetakan Ke-23. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Ke-3. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*.